AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.8193

ANALISIS PENERAPAN SISTEM POLITIK RASULULLAH SERTA RELEVANSINYA DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA MODERN (STUDI PEMERINTAHAN DI KECAMATAN ANYER, PROVINSI BANTEN)

Analysis of the Implementation of the Political System of *Rasulullah* and Its Relevance in Indonesia as a Modern State (A Study of Governance in Anyer District, Banten Province)

Saipul Nasution, Muhammad Azrul Amirullah, Lu'lu Galih Martajaya
Universitas Darussalam Gontor
saipul.nasution@unida.gontor.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 26, 2025	Nov 18, 2025	Nov 30, 2025	Dec 5, 2025

Abstract

This study is grounded in the evolving political, legal, and social dynamics in Indonesia, where, despite not being a religious state, Islam as the majority religion continues to exert a significant influence on the direction of change. The study aims to provide an in-depth analysis of the implementation of the Islamic political system and to evaluate its relevance in the context of Indonesia as a modern state based on *Pancasila*, with a particular focus on governmental practice in *Kecamatan Anyer*, Banten Province. A qualitative method with a phenomenological approach was employed, concentrating the analysis on the administration of sub-district government. The findings show that the integration of the Islamic political system in Indonesia is not realized through the formalization of an Islamic state ideology, but rather through the adaptation and negotiation of Islamic values within a democratic and pluralistic framework. In the context of the Anyer Sub-District Government, the relevance of

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Islamic political values is evident in their function as a source of ethics and morality that contributes to shaping the character of public officials and to formulating just and civilized policies. The apparatus of *Kecamatan Anyer* have applied values consistent with the Prophet's political principles, although implementation remains uneven due to bureaucratic constraints and low levels of community participation. The values of *syura* (consultation), justice, and exemplary leadership are shown to be relevant in supporting the effectiveness of development deliberations and in improving the quality of public service. This study affirms that the Prophet's political values can be adapted within a modern democratic system without altering the fundamental structure of the state and can make both theoretical and practical contributions to strengthening governance grounded in ethics and religious values. Overall, the integration of the Prophet's political values can serve as an applicative guideline for improving the quality of local government in Indonesia.

Keywords: Islamic Political System; the Prophet's Political Values; Pancasila; Democracy; Local Government; Anyer Sub-District

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika politik, hukum, dan sosial di Indonesia yang terus berkembang, di mana meskipun Indonesia bukan negara agama, Islam sebagai agama mayoritas tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap arah perubahan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam penerapan sistem politik Islam dan mengevaluasi relevansinya dalam konteks Indonesia sebagai negara modern berlandaskan Pancasila, dengan fokus kajian pada praktik pemerintahan di Kecamatan Anyer, Provinsi Banten. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang memfokuskan analisis pada penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi sistem politik Islam di Indonesia tidak diwujudkan dalam bentuk formalisasi negara Islam sebagai ideologi, melainkan melalui adaptasi dan negosiasi nilai-nilai Islam dalam kerangka demokrasi dan pluralisme. Dalam konteks pemerintahan Kecamatan Anyer, relevansi nilai-nilai politik Islam tampak pada fungsinya sebagai sumber nilai dan moral yang berkontribusi terhadap pembentukan karakter aparatur serta perumusan kebijakan yang adil dan beradab. Aparatur Kecamatan Anyer telah menerapkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip politik Rasulullah, meskipun implementasinya belum merata akibat kendala birokrasi dan rendahnya partisipasi masyarakat. Nilai *syura*, keadilan, dan keteladanan terbukti relevan dalam mendukung efektivitas musyawarah pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai politik Rasulullah dapat diadaptasi dalam sistem demokrasi modern tanpa mengubah struktur dasar negara, serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan tata kelola pemerintahan berbasis etika dan nilai keagamaan. Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai politik Rasulullah dapat menjadi pedoman aplikatif untuk memperbaiki kualitas pemerintahan daerah di Indonesia.

Kata Kunci: Sistem Politik Islam; Nilai-Nilai Politik Rasulullah; Pancasila; Demokrasi; Pemerintahan Daerah; Kecamatan Anyer

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki norma politik masing-masing ada yang memegang pada dasar agama, ada juga yang memegang pada dasar kebebasan berpendapat atau *demokrasi*, dengan adanya sistem politik tentu didalamnya gerdapat elemen daripada eksistensi sebuah negara yang berdaulat. Agama menjadi landasan sistem pemerintahan telah lama ada sejak zaman Rasulullah SAW dengan berdirinya kawasn yang memiliki tomggak sistem pemerintahan beserta masyarakat yaitu *Al Madinah.* Seiring dengan berkembangnya zaman pemikiran politik Islam mengalami dinamika yang sangat signifikan, terutama dengan munculnya tokoh-tokoh pembaharu yang mencoba mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam sistem politik modern (Hendra Yasin, 2025).

Secara global di dunia Islam terdapat tiga aliran tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan: Pertama, aliran pertama berpendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap, yang mencakup pengaturan bagi semua aspek manusia termasuk ketatanegaraan. Kedua, aliran kedua ini berpendapat bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, Islam tidak ada hubungannya dengan ketatanegaraan karena Nabi Muhammad SAW bukanlah sebagai kepala negara melainkan hanya seorang utusan Allah SWT. Ketiga, aliran ketiga ini berpendapat bahwa aliran ini menolak Islam adalah agama yang lengkap, namun juga menolak pendapat bahwa Islam tidak ada hubungan sama sekali dengan ketatanegaraan, aliran ini mengatakan bahwa dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara (Putera, 2018).

Semakin berkembangnya zaman pula politik Islam telah masuk ke dalam politik Indonsesia yang sebagai negara modern yang berlandaskan Pancasila. Meskipun Indonesia bukan negara agama, Islam sebagai agama mayoritas memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika politik, hukum, dan sosial (G, 2017). Status Indonesia sebagai negara non-agama tidak menafikan kenyataan bahwa Islam, sebagai agama dengan basis massa mayoritas, memiliki daya tarik dan pengaruh substansial terhadap konstelasi politik, yudisial, dan sosial. Meskipun Indonesia secara konstitusional didefinisikan sebagai negara non-agama, status ini tidak menafikan kenyataan bahwa Islam, sebagai entitas dengan basis penganut mayoritas, memiliki kapasitas hegemonic dan daya tarik substansial yang membentuk konstelasi dinamika politik, kerangka yudisial, dan tatanan sosial di tingkat nasional (Mujtahid et al., 2025).

Menarik dicermati pola-pola pemikiran politik Islam dalam kaitan dengan perseteruan Islam dan negara pasca kemerdekaan, di mana sebagian kalangan memandanganya sebagai sikap moderat umat Islam Indonesia di masa itu (Assidiqi et al., 2024). Maka dari itu, banyak kalangan melihat sebagai "kesuksesan" para tokoh Islam melahirkan falsafah dasar negara yaitu Pancasila melalui deklarasi Piagam Jakarta tahun 1945. Meski demikian, harus diakui bahwa tidak sedikit juga yang menilai hal tersebut sebagai "kegagalan" ulama atau tokoh per-gerakan Islam dalam perumusan final Piagam Jakarta, terutama terkait dengan penghapusan sembilan kata dalam sila pertama Pancasila yaitu "ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", yang kemudian berubah menjadi empat kata yaitu sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" Dalam perkembangannya, gagasan tentang negara Islam, muncul setelah pemilihan umum tahun 1955. Ketika itu, dalam kondisi demokrasi parlemen-ter yang berkembang semenjak tahun 1950-an, Dewan Konstituante diberi ke-sempatan untuk menyusun UUD baru, yang protagonisnya adalah Mohammad Natsir. Kondisi ini dapat dipahami, ketika tahun 1950-an pegerakan Islam Indonesia telah mengenal pemikiran-pemikiran kenegaraan yang dikembang-kan dari nilai-nilai Islam (Hasan, 2015).

Berdasarkan observasi awal di Kecamatan Anyer, Provinsi Banten, ditemukan bahwa praktik pemerintahan di tingkat kecamatan pada umumnya berjalan sesuai regulasi modern, namun masih menghadapi beberapa tantangan seperti koordinasi kelembagaan, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta partisipasi publik dalam proses musyawarah pembangunan. Beberapa aparatur pemerintahan menyampaikan bahwa mereka memiliki antusiasme terhadap penerapan nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal keteladanan, pelayanan publik, dan prinsip keadilan. Namun, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal karena keterbatasan sumber daya, dinamika sosial, dan budaya birokrasi yang cenderung administratif. Temuan awal ini menunjukkan adanya ruang untuk meneliti lebih dalam bagaimana nilai-nilai politik Rasulullah dapat menjadi referensi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

Selain itu, observasi juga memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat Anyer memandang penting adanya figur pemimpin yang amanah, transparan, dan mampu mengayomi seperti karakter kepemimpinan Rasulullah SAW. Di sisi lain, beberapa tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah menilai bahwa konsep syura dan keadilan yang diajarkan Rasulullah dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan efektivitas musyawarah

pembangunan, penyelesaian konflik lokal, serta peningkatan pelayanan publik. Namun, hingga kini belum banyak penelitian yang secara khusus menggali bagaimana prinsip-prinsip politik Rasulullah dapat diterapkan secara relevan dalam konteks pemerintahan kecamatan di Indonesia. Tujuan penelitian ini menjadi penting untuk menjembatani pemahaman antara nilai historis-politik Islam dengan praktik pemerintahan modern, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pengembangan sistem pemerintahan yang lebih humanis dan responsif.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara mendalam penerapan sistem politik Rasulullah serta relevansinya dalam konteks pemerintahan modern di Kecamatan Anyer, Provinsi Banten. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomologis menurut (Abdussamad, 2021) yaitu memahami fenomena kepemimpinan, tata kelola, dan praktik pemerintahan berdasarkan pengalaman langsung para pelaku pemerintahan dan masyarakat. Penelitian ini menekankan pemahaman makna di balik perilaku, kebijakan, dan praktik pemerintahan yang terjadi di level kecamatan. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan terhadap aktivitas birokrasi serta dinamika hubungan antara aparatur pemerintah dan masyarakat. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan terhadap camat, staf kecamatan, kepala Pemerintah, tokoh masyarakat, serta beberapa warga yang memiliki pengetahuan mengenai praktik pemerintahan setempat. Studi dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa peraturan daerah, dokumen musyawarah kecamatan, dan arsip pelayanan publik. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian berusaha menggali sejauh mana nilai-nilai politik Rasulullah dapat ditemukan atau diterapkan dalam praktik pemerintahan lokal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan catatan lapangan, serta data sekunder berupa dokumen pemerintahan Kecamatan Anyer dan literatur tentang sistem politik Rasulullah. Lokasi penelitian difokuskan di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, karena wilayah ini memiliki karakter sosial-keagamaan yang unik dan relevan untuk melihat integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik pemerintahan lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan lingkungan birokrasi, identifikasi informan kunci,

hingga pendalaman data melalui wawancara berulang. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga setiap temuan dapat diuji kebenarannya dari berbagai perspektif. Data dianalisis menggunakan analisis interaktif (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang sampai menghasilkan temuan yang kredibel. Proses analisis dilakukan sejak awal pengumpulan data sehingga pola-pola relevansi nilai sistem politik Rasulullah dapat segera diidentifikasi. Dengan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi nilai politik Islam dalam pemerintahan modern di tingkat kecamatan.

HASIL

Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Rasulullah di Kecamatan Anyer dapat dilihat dari ditinjau dari sesi Baitul Arqam maka akan mengarah pada pendidikan namun dengan aspek secara global atau luas untuk semua kalangan. Aktivitas pengajaran dan pelatihan masyarakat (*community teaching and training*) di Pemerintah Anyer, Banten, secara dominan diinisiasi dan difasilitasi melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) oleh berbagai institusi pendidikan tinggi serta inisiatif lokal. Berdasarkan data program yang telah teridentifikasi, intervensi ini mencakup spektrum luas peningkatan kapasitas di berbagai sektor kunci:

1. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik: Dilaksanakan pelatihan intensif mengenai metode pembelajaran aktif (*active learning methods)* yang ditujukan kepada guru-guru sekolah dasar di Pemerintah Anyer, dengan sasaran utama peningkatan kualitas pedagogi dan hasil belajar peserta didik.

2. Pemberdayaan Ekonomi dan Digitalisasi UMKM: Melalui skema Kuliah Kerja Nyata (KKN), seperti yang diimplementasikan oleh STTIKOM Insan Unggul Cilegon, telah difokuskan pada pelatihan pemasaran digital guna meningkatkan daya saing dan jangkauan pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat.

3. Pengembangan Keterampilan *Lifeskills* Perempuan: Diselenggarakan program pelatihan peningkatan keterampilan vokasional bagi kaum perempuan, seperti pelatihan merangkai seserahan, yang berfungsi sebagai stimulus pengembangan ekonomi kreatif rumah tangga.

4. Dukungan Pendidikan dan Kreativitas Anak/Remaja: Terdapat upaya komprehensif untuk mendukung tumbuh kembang anak dan remaja, yang diwujudkan melalui inisiatif Pemerintah Layak Anak di Kecamatan Anyar, mencakup aspek edukasi, pemanfaatan waktu luang, dan pelestarian budaya. Selain itu, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Rumah Tukik memegang peranan krusial dalam menstimulasi kreativitas seni dan literasi pada kelompok usia tersebut.

5. Edukasi Isu Sosial dan Perlindungan: Kolaborasi antara pihak kepolisian dan tim KKN pernah menyelenggarakan seminar pencegahan kenakalan remaja di SMP Negeri 1 Anyar sebagai upaya mitigasi risiko sosial pada populasi remaja.

6. Pengembangan Keterampilan Khusus dan Vokasi: Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) lokal menyediakan program pelatihan bahasa Jepang yang spesifik dirancang untuk mempersiapkan calon pekerja migran (CPMI) agar memenuhi standar kompetensi global.

7. Layanan Kesehatan dan Sosial Komunitas: Program PKM kolaboratif yang melibatkan multidosen dari berbagai universitas di Banten aktif menyelenggarakan bakti sosial, termasuk penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis, di area seperti Pemerintah Kenclong Tambang Ayam Anyer.



Gambar 1. Kegiatan bersama Komunitas dan Pemerintah Kecamatan Anyer

Dimana dalam gambar diatas berkaitan dengan kerjasama di dalam pemerintah dan kemasyarakatan bersama lembaga lainnya atau komitas dalam mengatasi berbagai permasalahan.

Al Suffah: Kegiatan kerohanian juga dijalankan di Pemerintah Anyer, hal tersebut merupakan bagian integral dari kehidupan bermasyarakat setempa. Beberapa contoh dan aspek kegiatan kerohanian di Pemerintah Anyer meliputi:

a. Pembangunan Tempat Ibadah: Masyarakat aktif dalam membangun dan meresmikan fasilitas keagamaan, seperti peresmian Masjid At-Taubah di Pemerintah Anyar, yang menunjukkan betapa pentingnya sarana ibadah bagi warga setempat.
b. Ajang Keagamaan Besar: Pemerintah Kabupaten Serang pernah menjadikan Anyer lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Acara ini diadakan sebagai bagian dari strategi untuk mengembangkan wisata berbasis syariah dan membantu memulihkan sektor pariwisata daerah.
c. Perayaan Hari Besar: Warga Kecamatan Anyar selalu ikut serta dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, contohnya adalah peringatan Hari Santri Nasional.
d. Tradisi dan Nilai Agama Menyatu: Ada tradisi lokal unik seperti "peperahan" di Pemerintah-Pemerintah sekitar Anyer. Tradisi ini punya makna dan nilai-nilai yang sangat erat kaitannya dengan ajaran Al-Qur'an dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bagaimana budaya dan agama berjalan beriringan.
e. Kerja Organisasi Keagamaan: Organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) di wilayah sekitar (misalnya Kecamatan Mancak), aktif menyusun rencana kerja jangka panjang yang mencakup berbagai kegiatan sosial dan keagamaan untuk melayani masyarakat.
f. Kegiatan Lintas Iman: Solidaritas antarumat beragama juga tumbuh melalui kegiatan ziarah bersama (lintas iman) ke lokasi seperti Goa Maria dan Pantai Anyer. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan.

Al-Kuttab: Al Kutab bila dikaitakn dengan kondisi sosial sekarang adalah mengacu pada aspek pendidikan anak-anak, Pendidikan anak di Pemerintah Anyer didukung oleh sistem sekolah formal (SD, SMP) dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial serta keluarga. Terdapat berbagai kegiatan sekolah yang berfokus pada pendidikan karakter, seperti literasi, ekstrakurikuler, dan pembiasaan. Masyarakat berperan penting dalam mendukung mutu pendidikan di Pemerintah, termasuk dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pendidikan. Berikut adalah keteangan konsep pendidkan yang telah ditinjau dari beberapa sektor antaralain sebagai berikut:

1) Sektor Pendidikan Formal

Pendidikan formal di Kecamatan Anyer terfasilitasi melalui ketersediaan lembaga pendidikan dasar (SD) dan menengah pertama (SMP). Institusi-institusi ini berfungsi sebagai lingkungan integral yang tidak hanya memfasilitasi transfer pengetahuan akademik, tetapi juga berperan sentral dalam pengembangan holistik peserta didik. Lingkungan sekolah

ditekankan sebagai ekosistem pembentuk pengalaman belajar komprehensif, yang mencakup aspek perkembangan sosial dan penanaman karakter siswa.

"berdasarkan di data kecamatan, sekolah pendidikan formal di Kecamatan Anyer itu sangatlah banyak mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sebagian kecil ada sekolah menengah akhir (SMA)". Ungkap salah satu pegawai pemerintahan kecamatan.

2) Pendidikan Non-Formal dan Pembentukan Karakter

Pembinaan karakter di lembaga formal, seperti sekolah di Pemerintah Anyer, diimplementasikan melalui strategi pedagogis terstruktur, meliputi program literasi, aktivitas ekstrakurikuler, dan pembiasaan positif harian. Selain itu, unit keluarga diakui sebagai komunitas primer yang fundamental dalam mediasi interaksi anak dengan lingkungan yang lebih luas serta dalam inokulasi nilai-nilai perilaku yang dihargai secara sosial. Lingkungan sosial sekolah lebih lanjut berfungsi sebagai laboratorium sosial yang esensial dalam membentuk disiplin dan meningkatkan keterampilan sosial (*social skills*) siswa.

3) Keterlibatan dan Peran Komunitas (*Community Engagement*)

Masyarakat memegang peran ganda yang strategis dalam ekosistem pendidikan. Pertama, masyarakat memiliki kewajiban suportif untuk memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam hal alokasi dan mobilisasi sumber daya. Kedua, komunitas berperan aktif dalam pengendalian mutu (*quality control*) layanan pendidikan. Keterlibatan ini diwujudkan melalui partisipasi dalam proses perencanaan program hingga pemantauan (monitoring) implementasi layanan pendidikan di wilayah Kecamatan Anyer.

"di Kecamatan Anyer banyak kegiatan termasuk atas bantuan komunitas luar. Dimana ini mirip dengan hal-hal yang dilakukan di zaman rasulullah, karena sama-sama memiliki porsi untuk memajukan suatu wilayah dan masyarakat termasuk di Anyer" Ungkap salah satu pemerintah Pemerintah di wilayah Kecamatan Anyer

Baitul Mal: Pengaturan dan pengelolaan aset (harta) Pemerintah Anyer, serta entitas Pemerintah lainnya di seluruh yurisdiksi nasional, diikat secara rigid oleh kerangka peraturan perundang-undangan hierarkis. Dasar hukum utama bermula dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah (UU Pemerintah), yang mendefinisikan aset sebagai barang milik Pemerintah yang berasal dari kekayaan inheren atau perolehan sah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBPemerintah). Regulasi

ini kemudian dirinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 (terakhir diubah oleh Permendagri Nomor 3 Tahun 2024), serta diperkuat oleh Peraturan Bupati Kabupaten Serang (misalnya Perbup No. 17/2022) yang menyediakan pedoman teknis operasional. Secara spesifik, pelaksanaannya di tingkat lokal harus diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (Perdes) Anyer. Pengelolaan aset harus berpedoman pada prinsip efisien, transparan, dan akuntabel. Siklus manajemen aset Pemerintah merupakan proses komprehensif yang mencakup tahapan fundamental: perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan (seperti penyewaan), pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan (misalnya tukar menukar dengan persetujuan otoritas kabupaten), serta penatausahaan dan pelaporan.

PEMBAHASAN

Struktur politik dalam lintasan sejarah Islam menunjukkan bahwa politik tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, dan geografis, sebagaimana dijelaskan Ibnu Khaldun dalam teori *total history*. Pendekatan historiografi ini menekankan bahwa peristiwa politik tidak dapat dipahami secara terpisah, tetapi selalu berada dalam jaringan faktor-faktor multidimensional yang saling terkait. Penelitian-penelitian modern seperti yang dilakukan oleh (Putera, 2018) juga mendukung gagasan bahwa perkembangan politik Islam harus dilihat melalui dinamika masyarakat, bukan hanya kepemimpinan formal. Sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW memperlihatkan bagaimana politik berfungsi sebagai wahana membangun peradaban, bukan sekadar perebutan kekuasaan, sehingga itu, pembahasan tentang sistem politik Rasulullah sangat relevan dalam memahami praktik pemerintahan kontemporer, termasuk di Indonesia (Ernawati Ernawati et al., 2024). Lintasan sejarah Islam secara jelas memperlihatkan evolusi politik dari model normatif-religius menuju struktur pemerintahan yang lebih sistematis dan institusional. Dengan demikian, memahami struktur politik Islam menjadi dasar penting untuk menganalisis bagaimana nilai-nilainya bertransformasi dalam konteks modern.

Penerapan sistem politik pada masa Rasulullah SAW merupakan fase penting dalam perkembangan tata kelola pemerintahan Islam yang berbasis wahyu. Sistem ini mengutamakan keadilan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan negara yang berorientasi pada kemaslahatan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Penelitian oleh (Mubasyaroh, 2018) menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi didasarkan pada prinsip

moral dan kebijaksanaan yang mampu merangkul seluruh kelompok masyarakat. Dalam konteks Madinah, Nabi tidak hanya memimpin sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai mediator, legislator, dan pembina moral masyarakat. Model kepemimpinan ini terbukti membangun masyarakat yang inklusif dan multikultural melalui Piagam Madinah. Kehadiran Piagam Madinah sebagai konstitusi telah menjadi contoh format awal negara modern yang menjunjung hak, kewajiban, dan toleransi antar-golongan. Dengan demikian, politik Rasulullah menjadi rujukan penting bagi sistem pemerintahan yang mencari keseimbangan antara nilai religius dan kebutuhan sosial.

Piagam Madinah yang sering dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah Islam memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana politik Islam diimplementasikan secara praktis. Isi Piagam ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas, mekanisme penyelesaian konflik, pembagian peran masyarakat, dan kewajiban bersama dalam menjaga keamanan. Penelitian (Adnan et al., 2024), menegaskan bahwa Piagam Madinah lahir sebagai solusi politik yang merangkul berbagai suku, agama, dan kepentingan sosial di Madinah. Konstitusi ini membuktikan bahwa Islam mendukung struktur negara yang plural, demokratis, dan berkeadilan. Pendekatan inklusif Rasulullah memungkinkan stabilitas politik yang kuat meski masyarakat Madinah sangat heterogen. Relevansi Piagam Madinah terhadap negara modern, khususnya Indonesia, sangat jelas dalam hal persatuan, toleransi, dan supremasi hukum, karena itu, prinsip-prinsipnya layak menjadi bahan pertimbangan bagi sistem pemerintahan kontemporer.

Selain Piagam Madinah, lembaga-lembaga yang dibangun Rasulullah seperti Baitul Arqam, Al-Suffah, Al-Kuttab, dan Baitul Mal menunjukkan bahwa tata kelola negara mencakup aspek pendidikan, sosial, dan ekonomi. Baitul Arqam menandai lahirnya pendidikan politik dan spiritual yang dilakukan secara terstruktur untuk memperkuat akidah dan identitas umat. Penelitian (Fikri, 2024) menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah awal Rasulullah tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Al-Suffah sebagai tempat pembelajaran berbasis masjid memberikan contoh bagaimana ruang publik dapat menjadi pusat pembinaan masyarakat dalam mengatasi permasalah (Fitriyah, 2025). Al-Kuttab berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal yang membentuk generasi literat dan berpengetahuan luas. Baitul Mal, sebagai lembaga keuangan negara, memastikan distribusi kekayaan berjalan adil dan merata. Keempat lembaga ini merefleksikan bahwa negara dalam konsep Islam bersifat holistik, tidak hanya berfokus pada politik formal tetapi juga pembangunan manusia.

Implementasi politik Islam di Indonesia menunjukkan pengaruh kuat nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan modern, meskipun Indonesia bukan negara agama. Penelitian oleh (Sri Zain et al., 2024)menunjukkan bahwa nilai Islam sangat dominan dalam budaya politik masyarakat Indonesia, terutama dalam aspek musyawarah, etika kepemimpinan, dan keadilan. Pancasila sebagai dasar negara juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, terutama pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sistem demokrasi Pancasila yang berbasis musyawarah mencerminkan prinsip *syura* dalam Islam. Dengan demikian, terdapat titik temu yang harmonis antara politik Islam dengan sistem politik modern Indonesia. Implementasi nilai-nilai Islam tidak dilakukan secara formalistik, tetapi lebih bersifat moral dan inspiratif dalam kebijakan publik. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam tetap relevan dalam format politik negara bangsa modern.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem politik Indonesia dapat dilihat dalam tata kelola pemerintahan, partisipasi politik, dan etika kepemimpinan. Prinsip *syura* menjadi dasar musyawarah dalam lembaga legislatif dan organisasi masyarakat. Penelitian (Aini & Sassi, 2025) menunjukkan bahwa nilai keadilan (*adl*) dan amanah dalam Islam menjadi standar moral yang harus dimiliki pemimpin modern. Etika politik ini menguatkan budaya kepemimpinan yang melayani, bukan memerintah secara otoriter. Selain itu, integrasi nilai Islam juga tampak dalam peraturan-peraturan terkait ibadah, zakat, dan haji yang diatur melalui undang-undang. Dengan demikian, sistem politik Indonesia menggabungkan elemen agama, budaya, dan hukum positif dalam praktiknya. Hal ini membuktikan bahwa nilai Islam tetap hidup dalam ruang publik Indonesia tanpa mengganggu struktur demokrasi. Integrasi ini juga memperkuat identitas negara yang religius tetapi tetap plural (Lintang, 2023).

Partisipasi politik umat Islam di Indonesia menjadi salah satu indikator tingginya pengaruh nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Penelitian (Rosman, 2017), menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik umat Islam sangat tinggi baik dalam pemilu maupun dalam organisasi sosial keagamaan. Umat Islam dipandang memiliki tanggung jawab moral untuk turut menentukan arah kebijakan negara. Prinsip tidak golput merupakan penegasan bahwa setiap warga Islam harus ikut serta menjaga stabilitas negara melalui proses demokratis. Kepemimpinan yang amanah juga menjadi harapan masyarakat terhadap para calon pemimpin baik di tingkat nasional maupun daerah. Keterlibatan kelompok Islam dalam lembaga legislatif, eksekutif, maupun ormas keagamaan memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam mempengaruhi pembentukan kebijakan publik. Dengan demikian, partisipasi politik

ini tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif dalam mempengaruhi kultur politik Indonesia.

Penerapan nilai-nilai hukum Islam di Indonesia dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural melalui peraturan negara dan pendekatan kultural melalui pembiasaan sosial. Pendekatan struktural terlihat pada regulasi ibadah haji, zakat, dan perbankan syariah yang memiliki landasan hukum formal. Penelitian (Suhaili, 2019) menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam ruang formal dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masyarakat. Pendekatan kultural bersifat lebih fleksibel karena melibatkan pendidikan, dakwah, dan pembudayaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi-tradisi lokal yang berkaitan dengan nilai Islam memperkuat jalinan antara agama dan budaya. Dengan demikian, penerapan hukum Islam di Indonesia berlangsung secara adaptif, tidak memaksakan bentuk negara agama. Pola implementasi ini membuktikan bahwa hukum Islam dapat berjalan harmonis dalam negara demokrasi modern.

Ketika konsep tata kelola pemerintahan Rasulullah dikaitkan dengan kondisi Kecamatan Anyer, dapat ditemukan berbagai bentuk penerapan nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan pengajaran, pemberdayaan masyarakat, dan pelatihan yang dilakukan melalui program PKM perguruan tinggi mencerminkan fungsi Baitul Arqam dalam konteks modern. Penelitian (Ahmad, 2025) menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat berperan memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi warga melalui pendekatan pendidikan. Di Anyer, kegiatan pelatihan guru, digitalisasi UMKM, dan pengembangan keterampilan perempuan merupakan bentuk implementasi nilai pendidikan dalam Islam. Upaya ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program-program tersebut mencerminkan nilai Islam tentang pentingnya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas umat. Maka dari itu, Baitul Arqam modern di Anyer berfungsi sebagai jembatan antara nilai keagamaan dan pembangunan masyarakat.

Kegiatan keagamaan yang berlangsung di Kecamatan Anyer dapat dihubungkan dengan konsep Al-Suffah pada masa Rasulullah. Al-Suffah merupakan ruang pembinaan spiritual, sosial, dan intelektual yang berbasis masjid, dan hal ini juga terlihat di Anyer. Penelitian (Sartika, 2023), mengungkapkan bahwa kegiatan kerohanian Pemerintah memiliki peran besar dalam membangun kohesi sosial dan moral masyarakat. Pembangunan masjid, pelaksanaan MTQ, perayaan hari besar Islam, dan kegiatan lintas iman adalah bentuk aktivitas

yang memperkuat spiritualitas komunitas. Tradisi lokal seperti peperahan juga memperlihatkan bahwa nilai agama terintegrasi dalam budaya masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut memperkuat moderasi beragama karena tidak hanya melibatkan umat Islam tetapi juga membangun harmoni dengan pemeluk agama lain (Khoiri et al., 2023). Dengan demikian, keberadaan kegiatan keagamaan di Anyer mencerminkan fungsi Al-Suffah sebagai pusat pembinaan masyarakat yang berkelanjutan.

Konsep Al-Kuttab yang berfokus pada pendidikan anak-anak juga memiliki relevansi kuat dengan kondisi pendidikan di Anyer. Sekolah formal seperti SD dan SMP memainkan peran utama dalam pengembangan literasi dan pembentukan karakter generasi muda. Penelitian (Septya, 2024), menunjukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pendidikan dasar memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Program literasi, ekstrakurikuler, dan pembiasaan karakter di sekolah mencerminkan pendekatan pendidikan Islam yang komprehensif. Selain itu, keluarga dan komunitas menjadi bagian penting dari proses pembentukan karakter anak-anak. Keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pendidikan memastikan bahwa proses belajar berjalan sesuai tujuan. Dengan demikian, pola pendidikan di Anyer mencerminkan konsep Al-Kuttab sebagai fondasi pembinaan generasi masa depan.

Sedangkan konsep Baitul Mal juga dapat diidentifikasi melalui pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan Anyer yang mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik. Penelitian (Zahro' & Ghozali, 2019) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah yang baik sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah sebagaimana Baitul Mal. Regulasi seperti UU Pemerintah, Permendagri, dan Peraturan Bupati memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan harta Pemerintah. Siklus pengelolaan aset yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga pelaporan mencerminkan prinsip-prinsip yang dahulu dijalankan dalam Baitul Mal. Penekanan pada akuntabilitas sejalan dengan nilai Islam tentang amanah dalam mengelola harta publik. Kejelasan regulasi juga memastikan bahwa aset Pemerintah digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu. Dengan demikian, Baitul Mal modern di Anyer tercermin dalam tata kelola keuangan Pemerintah yang baik.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai politik Islam pada masa Rasulullah dapat diimplementasikan secara fleksibel dan kontekstual dalam pemerintahan modern seperti Kecamatan Anyer. Penelitian-penelitian terdahulu

memperkuat argumentasi bahwa nilai Islam dapat hidup berdampingan dengan sistem demokrasi modern tanpa menimbulkan konflik normatif. Nilai pendidikan, ekonomi, spiritualitas, dan sosial yang terlihat dalam konteks Anyer membuktikan relevansi konsep Baitul Arqam, Al-Suffah, Al-Kuttab, dan Baitul Mal dalam era modern. Integrasi nilai tersebut tidak bersifat formalistik, tetapi melalui budaya, kebijakan lokal, dan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori sosial-politik Islam yang menekankan bahwa nilai Islam lebih berfungsi sebagai pedoman moral ketimbang sistem hukum negara yang kaku. Dengan model seperti ini, politik Islam dapat memberikan kontribusi konstruktif terhadap pembangunan masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa politik Islam relevan diterapkan dalam konteks modern sejauh dilakukan melalui pendekatan adaptif dan inklusif.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem politik Rasulullah memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan modern di Indonesia, khususnya di Kecamatan Anyer, Provinsi Banten. Nilai-nilai seperti keadilan, amanah, musyawarah, serta pelayanan publik yang humanis terbukti dapat memperkuat kualitas birokrasi lokal. Meskipun sistem politik Rasulullah berasal dari konteks sejarah yang berbeda, esensi ajarannya tetap dapat diadaptasi secara fleksibel dalam kehidupan bernegara saat ini. Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa sebagian aparatur Kecamatan Anyer telah menunjukkan praktik kepemimpinan yang mencerminkan nilai teladan Rasulullah. Namun, penerapan nilai-nilai tersebut belum merata karena masih terdapat kendala sumber daya, budaya birokrasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga menegaskan bahwa nilai-nilai Islam dapat berfungsi sebagai pedoman etis tanpa mengubah struktur sistem politik demokratis yang dianut Indonesia. Penerapan prinsip syura dan keadilan dapat mendukung efektivitas musyawarah pembangunan serta penyelesaian persoalan sosial di tingkat lokal. Dengan demikian, integrasi nilai sejarah politik Islam ke dalam praktik pemerintahan modern dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelayanan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem politik Rasulullah tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga aplikatif untuk memperkuat pemerintahan daerah dalam kerangka negara modern.

Kontribusi penelitian ini memperkaya kajian hubungan antara nilai-nilai politik Islam dan praktik pemerintahan modern di Indonesia, khususnya pada level pemerintahan kecamatan. Temuan penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa prinsip-prinsip politik Rasulullah, seperti keadilan, musyawarah, dan pelayanan publik, dapat menjadi landasan etis yang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah tanpa bertentangan dengan sistem demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi secara praktis dengan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh aparatur Kecamatan Anyer untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan memperbaiki pola hubungan dengan masyarakat. Dari sisi akademik, penelitian ini menambah referensi literatur tentang integrasi nilai Islam dalam sistem politik modern yang masih relatif terbatas, terutama dalam konteks pemerintahan lokal. Penelitian ini juga membuka ruang diskusi bagi peneliti lain untuk mengembangkan model tata kelola pemerintahan berbasis nilai-nilai moral Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Rekomendasi penelitian selanjutnya 1) memperluas cakupan kajian dengan membandingkan beberapa kecamatan atau daerah lain agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan nilai-nilai politik Rasulullah dalam berbagai konteks sosial dan birokrasi. 2) Menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur secara lebih sistematis sejauh mana nilai-nilai tersebut berpengaruh terhadap kinerja aparatur dan kepuasan masyarakat. 3) Mendatang dapat menambahkan variabel lain seperti budaya organisasi, kualitas kepemimpinan, atau tingkat religiusitas masyarakat untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan nilai politik Islam. 4) Mengkaji implementasi nilai-nilai Rasulullah pada level pemerintahan Pemerintah agar terlihat hubungan vertikal antara nilai keagamaan dan tata kelola dari bawah ke atas. Dengan melakukan pengembangan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam, luas, dan aplikatif bagi penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.

Adnan, A., Ali Akbar, M. Y., Muhibudin, M., & Hidayat, F. N. (2024). Politik Dakwah Rasulullah dalam Piagam Madinah dan Implementasinya pada Sistem Pemerintahan

di Indonesia. *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah*, *4*(2), 62–82. https://doi.org/10.53888/alidaroh.v4i2.699

Ahmad, I. (2025). Strategi Penguatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Digital. *Ilmiah*, *5*(3), 49.

Aini, N., & Sassi, K. (2025). Reaktualisasi Nilai Amanah dan Keadilan dalam Hukum Islam: Kajian Tematik QS. An-Nisa: 58 dalam Perspektif Kontemporer. *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*, *6*(3), 83–107. https://ejurnals.com/ojs/index.php/jpa/article/view/2971

Assidiqi, A. H., Barizi, A., & Mustofa, M. L. (2024). Tolerance and Social Harmonization of the Hindu Islamic Community of the Tengger Tribe in Eid Al-Fitr and Nyepi. *EDHJ: Education and Human Development Journal*, *9*(3), 245. https://doi.org/10.33086/ehdj.v9i3.6120

Ernawati, E., Bahar, S., & Kurniati, K. (2024). Penerapan Etika Politik Rasulullah dalam Tinjauan Etika Politik Islam Masa Kini. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, *2*(5), 264–275. https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.559

Fikri. (2024). Analisis Keberhasilan Dakwah Antara Masa Rasulullah Saw dan Khulafau Rasyidin. *Journal of Applied Transintegration Paradigm*, *4*(2), 70–90. https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/jatp/article/view/2727

Fitriyah, D. (2025). Analisis Kasus Broken Home pada Anak Putus Sekolah di Anyer Kabupaten Serang. *Jurnal Pendidikan Kreativitas Pembelajaran*, *7*(3), 244–248. https://journalversa.com/s/index.php/jpkp/article/view/1410

G, B. (2017). *Islam and Politics in Indonesia*. Routledge.

Hasan, H. (2015). Hubungan Islam dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia. *Al-Ahkam*, *25*(1), 19–42. https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.192

Khoiri, M. Y., Budiono, N. A., & Luthfiyatul, H. (2023). Peranan Keluarga dan Masyarakat dalam Pendidikan. *Cermin: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Berbasis Islam Nusantara*, *2*(2), 27. https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/cjmp/article/view/296

Lintang, C. (2023). Mengenal Lembaga Pendidikan di Masa Rasulullah SAW. *Detikhikmah*. https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6565771/mengenal-lembaga-pendidikan-di-masa-rasulullah-saw

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

Mubasyaroh, M. (2018). Pola Kepemimpinan Rasulullah: Cerminan Sistem Politik Islam. *Politea*, *1*(2), 95. https://doi.org/10.21043/politea.v1i2.4488

Mujtahid, M., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2025). The Concept of Religious Moderation from Sunan Kudus' Perspective and Its Correlation with Islamic Education in the Modern Era. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, *10*(1), 103–120. https://doi.org/10.32665/alulya.v10i1.3232

Putera, R. P. (2018). Pemikiran Politik Islam di Indonesia: dari Formalistik Menuju ke Substantif. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, *3*(1), 57–68. https://doi.org/10.32332/riayah.v3i01.1179

Rosman, E. (2017). Politik Hukum Islam di Indonesia (Kajian Reformasi Hukum dalam Kerangka Pemikiran Ibnu Taimiyah). *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, *3*(1), 85. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i1.259

Sartika. (2023). Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama Peserta Didik pada Kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kolaka. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah (JTPM)*, *6*(2), 23. https://journal.usimar.ac.id/index.php/jtpm/article/view/71

Septya, J. D. (2024). Faktor Sosial Budaya dan Pengembangan Masyarakat dalam Pendidikan Sekolah Dasar. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, *11*(1), 42. https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2047

Suhaili, A. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, *2*(2), 176–193. https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77

Yasin, H. (2025). Pemikiran Politik Hasan Al-Banna & Implementasinya terhadap Eksistensi Hukum Islam Modern. *Albanna*. IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Zahro', K., & Ghozali, M. (2019). Peran Baitul Mal dalam Daulah Islam Sebagai Sentral Perekonomian Negara. *Al-Ashlah: Journal of Islamic Studies*, *3*(1), 118–129.

Zain, S. H. W., Wilis, E., Syarkani, & Sari, H. P. (2024). Peran Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, *2*(4), 199–215. https://doi.org/10.61104/ihsan.v2i4.365